

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang sudah berjalan sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Namun, masih saja terdapat kendala, dalam hal ini terjadi keterlambatan waktu penyetoran uang persediaan dan juga pelaporan sisa uang persediaan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan pada awal anggaran sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) menjadi tidak efektif dan efisien.

Sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah didukung dengan dokumen-dokumen terdiri dari lima unsur yaitu :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya sesuai dengan permintaan yang direncanakan.
3. Surat Perintah Membayar (SPM) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa dokumen-dokumen yang masuk sehingga sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun lebih meneliti lagi mengenai dokumen yang dimasukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melalukan pencairan dana.
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terjadi keterlambatan waktu pertanggungjawaban yang kurang baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, dari hasil penelitian disarankan kepada pimpinan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang agar bisa meningkatkan dan mempertahankan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga, tidak terus-menerus menyebabkan

kendala pada saat pengungkapan posisi saldo kas akhir dalam laporan keuangan.

2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang harus lebih meningkatkan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan agar tidak terjadi lagi keterlambatan waktu yang berdampak pada proses penyetoran pada uang persediaan dalam laporan keuangan yang sudah ditetapkan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien.
3. Untuk peneliti selanjutnya, supaya dapat meningkatkan kualitas sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) dan juga sistem akuntansi pengeluaran kas ganti uang (GU), sistem akuntansi pengeluaran kas tambahan uang persediaan (TUP), dan sistem akuntansi pengeluaran kas langsung (LS) yang lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.2014. *Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Keempat. Salemba Empat : Jakarta.*
- Buletin Teknis. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Nomor 14. Akuntansi Kas.
- Halim Abdul.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Mulyadi.2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN..
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No 71/2010*. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*, Buku Satu, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono Dr. Dwi dan Sholihin Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pemerintahan Berbasis Akrual.

Lahay. 2013. *Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.*

Miranda Kaunang. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara.*

Mahmud Rahmad. 2016. *Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP )Pada Dinas Sosial Kota Manado.* Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Halaman 692-702

Velasco Wongkar, Sifrid S. Pangemanan dan Heince R. N. Wokas. 2018. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan Pada Dinas Sosial Kota Manado.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern vol. 13, No 3, Halaman 509-517